



## **KONTRIBUASI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

**Heylen Amildha Yanuarita<sup>1)</sup>, Satriyani Cahyo Widayati<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Kediri

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan fokus pada bentuk kontribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan perangkat desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Darungan Mandiri berkontribusi terhadap PADes melalui diversifikasi unit usaha, seperti perdagangan, jasa keuangan, dan penyewaan alat. Kontribusi tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan mendukung UMKM lokal. Namun, kontribusi BUMDes masih bersifat pelengkap dan belum mampu mentransformasi struktur ekonomi desa secara signifikan. Partisipasi masyarakat juga masih bersifat instrumental, sementara keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang konvensional, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital menjadi kendala utama. Temuan penelitian menegaskan bahwa kontribusi BUMDes merupakan hasil interaksi dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi manajerial, dan tata kelola partisipatif diperlukan untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa.

**Kata Kunci:** BUMDes, PADes, Ekonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan.

---

\*Correspondence Address : [heylenay@unik-kediri.ac.id](mailto:heylenay@unik-kediri.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v13i6.2026.1532-1539

© 2026UM-Tapsel Press

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam sistem pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri. Hal ini ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan legitimasi kepada desa untuk mengembangkan kemandirian ekonomi melalui berbagai instrumen kelembagaan, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Kementerian Desa PDTT (2020), BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Dengan demikian, BUMDes menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi desa yang berkelanjutan.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi desa adalah meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset, swadaya masyarakat, serta sumber lain yang sah (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Peningkatan PADes mencerminkan tingkat kemandirian desa dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam konteks tersebut, BUMDes diharapkan mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PADes. Secara teoritis, keberadaan BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengembangan unit-unit usaha yang produktif dan berbasis potensi lokal. Menurut Blakely dan Leigh (2013), pembangunan ekonomi lokal akan efektif apabila lembaga ekonomi mampu mengoptimalkan sumber daya lokal secara inovatif dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi BUMDes di berbagai daerah menunjukkan hasil yang tidak seragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BUMDes terhadap PADes masih belum optimal akibat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, kurangnya inovasi usaha, serta rendahnya partisipasi masyarakat (Prabowo, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris dalam pengelolaan BUMDes.

Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan salah satu desa yang telah mengembangkan BUMDes dengan nama BUMDes Darungan Mandiri. BUMDes ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui berbagai unit usaha yang dijalankan. Namun, sejauh mana kontribusi BUMDes tersebut terhadap peningkatan PADes masih perlu dikaji secara lebih mendalam dan sistematis.

Selain itu, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kontribusi yang diberikan oleh BUMDes, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi tersebut dapat berupa keuntungan usaha, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, maupun penciptaan lapangan kerja. Menurut teori pemberdayaan ekonomi, kontribusi lembaga ekonomi lokal tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas masyarakat (Chambers, 1995).

Lebih lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi BUMDes juga menjadi aspek penting yang perlu dianalisis. Faktor tersebut dapat bersifat internal, seperti kapasitas pengelola dan manajemen usaha, maupun eksternal, seperti dukungan pemerintah desa dan kondisi pasar. Analisis terhadap faktor-faktor ini penting untuk memahami kendala sekaligus peluang dalam pengembangan BUMDes.

Meskipun kajian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek deskriptif terkait peran dan kinerja BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa. Sejumlah studi menekankan kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), namun umumnya hanya mengukur dari sisi finansial tanpa mengkaji dimensi sosial dan kelembagaan secara komprehensif (Prabowo, 2019). Di sisi lain, penelitian dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal oleh Ronald J. Blakely dan Nancy Green Leigh (2013) lebih banyak menyoroti peran institusi lokal dalam konteks makro, tanpa secara spesifik mengkaji BUMDes sebagai entitas unik dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1995) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun belum banyak diintegrasikan dalam analisis kontribusi BUMDes. Sementara itu, perspektif kelembagaan dari Elinor Ostrom (1990) menyoroti pentingnya tata kelola dan kapasitas organisasi, tetapi masih jarang digunakan secara simultan dalam studi BUMDes.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam

menganalisis kontribusi BUMDes terhadap PADes. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan analisis multidimensional yang tidak hanya mengukur kontribusi BUMDes secara finansial, tetapi juga mengkaji bentuk kontribusi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam satu kerangka teoritis yang terpadu.

Berdasarkan konstruksi konseptual dan empiris yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana kontribusi BUMDes Darungan Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari keberlanjutan usaha dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Kedua, apa saja bentuk kontribusi yang dihasilkan oleh BUMDes, baik dalam bentuk kontribusi langsung berupa pendapatan desa maupun kontribusi tidak langsung seperti penguatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penciptaan nilai tambah lokal. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kontribusi tersebut, baik yang bersifat internal seperti kapasitas manajerial dan tata kelola kelembagaan, maupun faktor eksternal seperti dukungan kebijakan dan dinamika pasar. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk membangun kerangka analisis yang sistematis, terarah, dan mampu menjelaskan hubungan antara keberadaan BUMDes dengan peningkatan PADes secara komprehensif.

Sejalan dengan fokus permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan berbasis evidensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kontribusi BUMDes terhadap PADes dengan pendekatan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga

interpretatif; mengidentifikasi secara rinci bentuk-bentuk kontribusi yang dihasilkan oleh BUMDes dalam konteks ekonomi desa; serta mengungkap secara analitis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang menentukan efektivitas kontribusi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah teoritis dalam kajian ekonomi desa dan kelembagaan lokal, tetapi juga memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi strategis bagi optimalisasi pengelolaan BUMDes, khususnya di Desa Darungan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kontribusi BUMDes, bentuk kontribusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks empiris. Informan penelitian ditentukan secara purposive, meliputi kepala desa, pengelola BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait kontribusi BUMDes terhadap PADes, bentuk kontribusi ekonomi dan sosial, serta faktor pendukung dan penghambat. Observasi dilakukan untuk memahami aktivitas operasional BUMDes, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data terkait pengelolaan dan unit usaha BUMDes. Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji

melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Kontribusi BUMDes terhadap PADes dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Lokal**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Darungan Mandiri berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), terutama melalui diversifikasi unit usaha seperti perdagangan, jasa keuangan, dan penyewaan alat. Kontribusi ini menegaskan bahwa BUMDes telah berfungsi sebagai instrumen ekonomi lokal yang produktif (Ronald J. Blakely & Nancy Green Leigh, 2013).

Dalam kerangka teori pembangunan ekonomi lokal oleh Ronald J. Blakely dan Nancy Green Leigh (2013), lembaga ekonomi lokal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbasis potensi wilayah. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Philip Lowe et al. (2019) dalam *Journal of Rural Studies* yang menegaskan bahwa institusi lokal menjadi aktor kunci dalam menggerakkan ekonomi pedesaan melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Namun demikian, jika dianalisis secara kritis, kontribusi BUMDes Darungan masih berada pada tahap *economic supplementation*, bukan *economic transformation*. Artinya, BUMDes telah meningkatkan PADes, tetapi belum mampu mentransformasi struktur ekonomi desa secara signifikan. Hal ini konsisten dengan temuan Jonathan P. Rigg (2020) dalam *World Development* yang menyatakan bahwa banyak institusi ekonomi desa di negara berkembang cenderung berfungsi sebagai pelengkap ekonomi, bukan sebagai penggerak utama transformasi struktural.

Dengan demikian, kontribusi BUMDes perlu dipahami tidak hanya sebagai indikator peningkatan pendapatan, tetapi sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi lokal yang masih berkembang dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

## **2. Bentuk Kontribusi dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat**

Bentuk kontribusi BUMDes tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kontribusi sosial-ekonomi melalui peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi (Robert Chambers, 1995; Anthony Bebbington, 2018). BUMDes menyediakan layanan seperti penyewaan alat usaha, akses pembiayaan, serta dukungan terhadap UMKM lokal.

Dalam perspektif teori pemberdayaan oleh Robert Chambers (1995), pembangunan yang efektif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang inklusif, seperti fleksibilitas pembayaran dan akses usaha.

Selain itu, penelitian Yuliasuti et al. (2022) mengenai perubahan sosial masyarakat pedesaan menunjukkan bahwa dinamika sosial dan kapasitas adaptasi masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi desa.

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih bersifat instrumental, yaitu sebatas sebagai pengguna layanan,

belum mencapai tahap *transformative participation*. Hal ini sejalan dengan studi Andrea Cornwall (2008) dalam *Community Development Journal* yang menegaskan bahwa banyak program pemberdayaan belum mampu mencapai partisipasi substantif karena masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, penelitian Anthony Bebbington (2018) dalam *World Development* menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi hanya efektif apabila disertai dengan peningkatan kapasitas dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya. Dalam konteks ini, BUMDes Darungan masih perlu memperkuat dimensi partisipatif agar kontribusinya tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga transformatif.

## **3. Faktor yang Mempengaruhi dalam Perspektif Kelembagaan**

Kontribusi BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, termasuk kapasitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan dukungan kebijakan (Elinor Ostrom, 1990; Douglas North, 1991). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan SDM, sistem manajemen yang masih konvensional, serta tekanan kompetisi dari usaha lokal. Selain keterbatasan sumber daya manusia, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan BUMDes masih bersifat konvensional. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas BUMDes masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran. Kondisi ini membatasi jangkauan pasar serta efisiensi pengelolaan usaha.

Dalam perspektif kelembagaan oleh Elinor Ostrom (1990), keberhasilan institusi lokal sangat ditentukan oleh aturan yang jelas, kapasitas aktor, dan mekanisme tata kelola yang adaptif. BUMDes Darungan menunjukkan bahwa

meskipun telah memiliki struktur kelembagaan, namun kapasitas operasionalnya masih belum optimal.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan studi Haryati dan Yanuarita (2020) mengenai evaluasi pengelolaan dana desa yang menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola, akuntabilitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas tata kelola kelembagaan dan kemampuan membangun partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Douglas North (1991) dalam *Journal of Economic Perspectives* yang menyatakan bahwa kelembagaan yang lemah akan membatasi efektivitas organisasi ekonomi dalam menghasilkan kinerja yang optimal. Selain itu, studi Mariana Mazzucato (2018) menekankan pentingnya inovasi dan kapasitas organisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kendala yang dihadapi BUMDes Darungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, yang memerlukan intervensi pada aspek kapasitas kelembagaan dan inovasi manajerial.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Darungan Mandiri memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui diversifikasi unit usaha yang dijalankan, seperti perdagangan, jasa keuangan, dan penyewaan alat. Kontribusi tersebut tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial-ekonomi melalui peningkatan

akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, dukungan terhadap UMKM, serta penguatan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, BUMDes telah berperan sebagai instrumen ekonomi desa yang produktif, meskipun kontribusinya masih berada pada tahap *economic enabler* dan belum sepenuhnya mencapai transformasi ekonomi desa secara struktural.

Bentuk kontribusi BUMDes bersifat multidimensional, yang mencakup kontribusi finansial, fasilitatif, dan potensi transformasional. Namun, partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat instrumental sebagai pengguna layanan, sehingga peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan dimensi partisipatif menjadi aspek penting dalam meningkatkan kontribusi BUMDes secara berkelanjutan.

Selain itu, kontribusi BUMDes dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan, serta dukungan kebijakan. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, sistem manajemen yang masih konvensional, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi BUMDes tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi BUMDes merupakan hasil interaksi antara dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, optimalisasi peran BUMDes memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi manajerial, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penambah PADes, tetapi juga sebagai aktor utama

dalam mendorong transformasi pembangunan ekonomi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cai, M., & Sun, X. (2018). Institutional bindingness, power structure, and land expropriation in China. *World Development*, 109, 172–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.04.019>
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Institute of Development Studies.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The triple helix: University–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>
- Haryati, S., & Yanuarita, H. A. (2020). *Evaluasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik dan non fisik di Kecamatan Doko Kelurahan Blitar*. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 4(2)
- Heal, G. (2012). Defining and measuring sustainability. *Review of Environmental Economics and Policy*, 6(1), 147–163. <https://doi.org/10.1093/reep/rer023>
- Huff, W. G. (1999). Singapore's economic development: Four lessons and some doubts. *Oxford Development Studies*, 27(1), 33–55. <https://doi.org/10.1080/13600819908424165>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum pengelolaan BUMDes*. Kemendes PDTT.
- Li, Y., Westlund, H., & Liu, Y. (2019). Why some rural areas decline while others not: An overview of rural evolution in the world. *Journal of Rural Studies*, 68, 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.03.003>
- Lowe, P., Phillipson, J., & Proctor, A. (2019). Expertise in rural development: A conceptual and empirical analysis. *World Development*, 116, 28–37. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.12.005>
- Matti, S. (2010). Resources and rent seeking in the Democratic Republic of the Congo. *Third World Quarterly*, 31(3), 401–413. <https://doi.org/10.1080/01436597.2010.488471>
- Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moulaert, F., & Van Dyck, B. (2013). Framing social innovation research: A sociology of knowledge perspective. In *International handbook on social innovation* (pp. 80–90). Edward Elgar Publishing.
- North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Prabowo, A. (2019). Peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Rigg, J. P. (2014). *More than the soil: Rural change in Southeast Asia*. Routledge.

Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.3386/w10894>

Soetjipto, H. M. N. (2015). *Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Jawa Timur: Analisis inferensial kinerja pengelola badan usaha milik desa*. K-Media.

Wardhana, A., et al. (2018). *Kajian dana desa: Analisis empiris badan usaha milik desa, kesempatan kerja, dan infrastruktur pada seribu desa di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Yuliasuti, N., Suwarno, S., Bramantyo, R. Y., & Yanuarita, H. A. (2022). *Perubahan sosial masyarakat petani tebu dalam perspektif local wisdom (ditinggalkannya upacara tradisi pada masyarakat petani tebu di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1)